

Perubahan Kebijakan Pertahanan Turki Mendukung Keanggotaan Finlandia di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO): Perspektif Reputasi

Sirwan Yazid Bustami¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, 83125
sirwan@unram.ac.id

ABSTRACT

The Russia-Ukraine conflict has raised concerns among the Nordic countries bordering Russia such as Finland, Sweden, Denmark, Iceland, and Norway. Russia's military invasion in Ukraine and its military aggressiveness in the region threatens regional stability and security of the Nordic countries. As one of the Nordic countries, Finland responded to Russian aggressiveness by joining the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to counteract Russia's security threats in the region. Finnish membership in NATO was rejected by Turkiye as one of the NATO membership veto holders. However, Turkiye changed its defence policy by supporting Finnish membership in NATO. This study aims to analyze the role of reputation in influencing Turkiye's defence policy change to support Finnish membership in NATO. Using an analytical descriptive research method accompanied by Jonathan Mercer's reputation theory, this study proposes the main argument that Turkiye's defence policy change in favor of Finnish membership in NATO was influenced by Turkiye's reputation factor as a reliable NATO strategic ally. Turkiye endeavours to maintain this reputation as NATO allies are skeptical of Turkish commitment to uphold NATO's values and principles. Turkish support for Finnish membership in NATO confirms Turkish commitment to NATO enlargement in order to create regional stability and security in Europe.

Keywords: *Turkiye, Finland, NATO's Values and Principles, Reputation, Russian Aggressiveness*

ABSTRAK

Konflik Rusia-Ukraina menimbulkan kekhawatiran negara-negara Nordik yang berbatasan langsung dengan Rusia seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Islandia, dan Norwegia. Invasi militer Rusia di Ukraina serta agresivitas militer Rusia di kawasan mengancam stabilitas regional dan keamanan negara-negara Nordik. Sebagai salah satu negara Nordik, Finlandia merespon agresivitas Rusia dengan bergabung ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) guna menangkal ancaman keamanan Rusia di kawasan. Bergabungnya Finlandia ke dalam NATO memperoleh penolakan dari Turki sebagai salah satu negara pemegang hak veto keanggotaan NATO. Namun Turki mengubah kebijakan pertahanannya dengan mendukung keanggotaan Finlandia di NATO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran reputasi dalam memengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis disertai teori reputasi Jonathan Mercer, penelitian ini mengajukan argumen utama bahwa perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh faktor reputasi Turki sebagai sekutu strategis NATO yang andal. Reputasi ini berupaya dipertahankan oleh Turki seiring sikap skeptis sekutu-sekutu NATO terhadap komitmen Turki dalam menegakkan nilai dan prinsip NATO. Dukungan Turki terhadap keanggotaan Finlandia di NATO menegaskan komitmen Turki terhadap perluasan NATO demi menciptakan stabilitas regional dan keamanan di Eropa.

Kata Kunci: Turki, Finlandia, Nilai dan Prinsip NATO, Reputasi, Agresivitas Rusia

PENDAHULUAN

Dinamika perubahan geopolitik global dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap keamanan internasional. Beragam konflik geopolitik bermunculan baik regional maupun global dan berdampak secara luas terhadap stabilitas dan keamanan internasional. Konflik ini muncul disebabkan karena adanya kontestasi kepentingan baik politik, ekonomi maupun militer antarnegara yang saling bertentangan dan dipicu oleh adanya beragam persoalan meliputi perbedaan klaim teritorial; persaingan kekuatan militer; perebutan sumber daya alam (SDA); perbedaan ideologi serta ambisi untuk memperluas pengaruh di wilayah tertentu (*sphere of influence*). Praktis situasi semacam ini menciptakan ketidakpastian keamanan (*security under uncertainty*) dan berpotensi menciptakan ancaman keamanan yang lebih luas.

Salah satu instrumen kebijakan pertahanan yang dianggap efektif dalam merespon situasi ketidakpastian keamanan internasional adalah aliansi militer (*military alliance*). Pembentukan aliansi militer dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mempromosikan stabilitas dan keamanan internasional di tengah eskalasi konflik geopolitik berkepanjangan (Starr & Siverson, 1990). Salah satu aliansi militer yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional dan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keamanan internasional adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO, *North Atlantic Treaty Organization*) (Forster & Wallace, 2001).

Secara historis, NATO merupakan aliansi militer yang didirikan oleh Blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, dan sejumlah negara Eropa Barat yang berdiri pada tahun 1949. Kehadiran NATO ditujukan sebagai respon terhadap ancaman Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Aliansi ini terbentuk bertujuan untuk mempromosikan kerjasama di antara negara-negara anggota meliputi kerjasama pertahanan kolektif (*collective defense*), kerjasama militer, dan menjaga perdamaian serta stabilitas di Atlantik Utara. Selama berpuluh-puluh tahun NATO telah berkontribusi menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut dan terlibat dalam berbagai misi perdamaian dan operasi militer di berbagai belahan dunia sebagai upaya menjaga keamanan global dan mempromosikan perdamaian internasional (Rogozińska, 2020).

Sejak terbentuk pada tahun 1949, keanggotaan NATO telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada mulanya skop keanggotaan hanya terbatas pada negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 dan runtuhnya Uni Soviet, NATO mulai melakukan perluasan keanggotaan dengan mengundang negara-negara Eropa Timur (*NATO Eastward Expansion*) yang sebelumnya menjadi bagian dari Blok Uni Soviet dan Pakta Warsawa (*Warsaw Pact*) (Averre, 1998; Marten, 2018; Nikolin, 1998). Hingga saat ini jumlah negara anggota NATO telah mencapai 30 negara dan menempatkannya sebagai aliansi militer terbesar dan terkuat di dunia.

Namun, kendati NATO telah mengalami perluasan signifikan sejak akhir Perang Dingin, sejumlah negara masih terus berjuang memperoleh status keanggotaan dalam

aliansi tersebut. Salah satu negara yang menaruh minat bergabung dengan aliansi ini adalah Finlandia. Secara geografis, Finlandia merupakan salah satu negara Nordik yang terletak di Eropa Utara dan memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Sebagai negara berhaluan kebijakan luar negeri yang netral dan non-anggota NATO, Finlandia telah menunjukkan minat dan komitmen yang kuat untuk bergabung dengan NATO. Kehadiran Finlandia di NATO diharapkan dapat memperkuat pertahanan kolektif dan keamanan nasional serta meningkatkan kerjasama politik dan militer yang lebih erat dengan negara anggota lainnya (Arter, 1996).

Namun proses bergabung ke dalam NATO tidak selalu berjalan mulus bagi setiap negara yang mengajukan permohonan keanggotaan. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi persetujuan dari negara-negara anggota NATO terhadap keanggotaan baru. Salah satu faktor kunci yang berpengaruh adalah sikap dan pandangan negara-negara anggota NATO terhadap negara yang mengajukan permohonan keanggotaan. Diperlukan persetujuan kolektif dari seluruh negara anggota sehingga keanggotaan baru dapat diterima. Proses ini merupakan tahapan yang paling kompleks karena memerlukan kompromi dan negosiasi yang alot terkait dengan kriteria penerimaan keanggotaan baru (Eichler, 2021).

Dalam beberapa dekade terakhir, Finlandia berupaya memperoleh status keanggotaan NATO sebagai langkah taktis guna memastikan terwujudnya stabilitas regional, memperkuat pertahanan, dan menjamin keamanan nasional (Forsberg & Vaahtoranta, 2001). Finlandia akan menjadi negara anggota ke-31 apabila diterima secara kolektif dalam keanggotaan NATO. Sebagai salah satu negara anggota Nordik yang berada di Eropa Utara dan secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia, konflik geopolitik melibatkan Rusia-Ukraina memunculkan kekhawatiran atas ancaman keamanan di kawasan mengingat eskalasi konflik berkepanjangan serta diperburuk oleh agresivitas militer Rusia di kawasan mendorong Finlandia untuk mempertimbangkan status keanggotaan NATO sebagai langkah taktis merespon situasi ketidakpastian keamanan regional (Nokkala, 2023).

Agresivitas militer Rusia di kawasan dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan regional di Eropa Utara. Ancaman pengerahan serta mobilisasi kekuatan militer Rusia di kawasan mengancam keamanan nasional negara-negara anggota Nordik tanpa terkecuali Finlandia. Ekspansionisme Rusia dikhawatirkan akan meluas ke Eropa Utara sebagaimana invasi Rusia ke Ukraina mempertimbangkan inferioritas kapabilitas militer negara-negara anggota Nordik *vis-à-vis* superioritas kekuatan militer Rusia. Bergabungnya Finlandia ke dalam NATO dipandang sebagai bentuk strategi deterensi dalam menetralsir ancaman militer Rusia di kawasan (Arter, 2023; Nokkala, 2023).

Namun upaya Finlandia memperoleh status keanggotaan NATO menghadapi tantangan dari salah satu negara anggota terutama Turki. Langkah Finlandia bergabung dengan NATO ditentang keras oleh Turki karena skeptisisme terhadap keanggotaan Finlandia di NATO. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa penerimaan Finlandia ke dalam NATO dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia karena keberadaan aliansi militer di perbatasan Rusia berpotensi memicu respon yang tidak diinginkan. Konsekuensi terburuk kehadiran militer yang berlebihan dapat meningkatkan ketegangan dan memicu perlombaan senjata di kawasan Baltik dan

Laut Baltik. Terlebih lagi Turki merupakan negara anggota NATO yang memiliki hubungan kompleks dengan Rusia terutama terkait masalah regional seperti Suriah dan Ukraina. Di samping itu keanggotaan Finlandia di NATO dapat membahayakan kepentingan strategis Turki di kawasan karena dianggap mengancam keamanan dan stabilitas regional. Lebih jauh Turki juga khawatir dengan penambahan anggota baru berpotensi menimbulkan friksi atas beragam pandangan permasalahan kawasan sehingga berimplikasi pada keputusan strategis NATO (Neset, 2023; Yackley & Milne, 2023).

Turki memainkan peran vital dalam konteks keanggotaan NATO karena memiliki hak veto (*veto power*) yang memungkinkannya menolak permohonan keanggotaan baru. Sikap Turki menolak keanggotaan Finlandia menimbulkan perdebatan secara internal diantara sesama negara anggota. Langkah Turki menghambat keanggotaan Finlandia memunculkan persepsi negatif mengingat sikap dan pandangan Turki yang seringkali bertentangan dan kontraproduktif dengan sebagian besar negara anggota NATO. Bahkan sejumlah negara anggota mempertanyakan eksistensi Turki di NATO yang dianggap melanggar nilai-nilai dan tujuan didirikannya NATO (Ashford & Kroenig, 2023; Bölme, 2022; Cordesman, 2019; Crowley & Erlanger, 2022; Oğuzlu, 2012b).

Namun Turki berbalik arah mengubah sikap dan pandangan terkait permohonan keanggotaan Finlandia di NATO setelah sebelumnya menolak secara keras. Langkah ini menunjukkan pergeseran strategis dalam kebijakan pertahanan Turki dan memberikan sinyalemen kuat kepada Finlandia bahwa Turki mendukung keanggotaan negara tersebut di NATO (Bayer, 2023a; Gunter, 2022). Sebelumnya Turki telah mengadopsi sikap skeptis terhadap perluasan NATO dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa keputusan aliansi tersebut. Namun dengan perubahan kebijakan ini Turki berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota NATO dan meningkatkan partisipasinya dalam kebijakan-kebijakan aliansi.

Finlandia merupakan negara netral yang telah lama mendukung perdamaian dan stabilitas di Eropa. Bergabungnya Finlandia ke dalam NATO diharapkan dapat meningkatkan kekuatan dan efektivitas aliansi tersebut dalam menghadapi berbagai macam potensi ancaman keamanan baik tradisional maupun non-tradisional di Eropa. Keanggotaan Finlandia di NATO diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat keamanan Eropa dan memperkuat solidaritas antara negara-negara anggota aliansi (Arter, 1996, 2023; Forsberg & Vaahoranta, 2001).

Dukungan Turki dianggap sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan negara-negara anggota NATO lainnya mengingat Finlandia harus melalui proses negosiasi dan persetujuan oleh negara-negara anggota NATO yang sudah ada. Perubahan kebijakan ini juga merupakan indikator dari pergeseran orientasi yang lebih luas dalam politik luar negeri Turki yang mengandung konsekuensi jangka panjang dalam hubungan internasional di kawasan tersebut guna memperkuat stabilitas dan keamanan regional di Eropa. Sebagai negara anggota NATO yang aktif Turki mengakui pentingnya memperluas aliansi dan memperkuat pertahanan kolektif di Eropa (Kinacioğlu & Gürzel, 2013).

Perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO berdampak signifikan terhadap pembentukan persepsi dan citra Turki di hadapan negara anggota NATO lainnya. Pasalnya dalam beberapa dekade terakhir sejumlah negara anggota menaruh kecurigaan serta bersikap skeptis terhadap

keanggotaan Turki di NATO karena sejumlah kebijakan kontroversial yang inkonsisten dengan garis kebijakan pertahanan NATO (Bongiovanni, 2018; Cordesman, 2019; Erdurmaz, 2019; Jamilah et al., 2020). Praktis Turki dihadapkan pada persoalan krisis kepercayaan karena rendahnya tingkat kepatuhan serta merosotnya kredibilitas Turki sebagai sekutu strategis NATO. Alhasil reputasi Turki sebagai anggota NATO memperoleh tantangan seiring beragam permasalahan domestik serta konflik internal yang melibatkan Turki dan NATO (Bandow, 2022; Temko, 2023).

Berdasarkan elaborasi permasalahan di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian, yakni “Bagaimana peran reputasi memengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO?”. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran reputasi Turki sebagai anggota NATO dalam memengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO sebagai upaya perluasan NATO.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah literatur akademis mengulas sikap dan kebijakan Turki terkait dengan perluasan NATO dengan beragam perspektif yang berbeda-beda berdasarkan faktor geopolitik (*geopolitical factors*), keamanan regional (*regional security*), dan kepentingan strategis (*strategic interest*). *Pertama*, tulisan Abdullah M. Tuncer berjudul “Turkey’s Options for Finland and Sweden’s NATO Membership Applications” menjelaskan kebijakan Turki dalam mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh faktor geopolitik, keamanan regional, dan kepentingan strategis. Turki menganggap bergabungnya Finlandia ke dalam NATO akan mendorong stabilitas dan kerjasama regional di Eropa Utara dan Timur serta memperkuat posisi NATO dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah Baltik dan Laut Baltik. Selain itu keberadaan Finlandia di NATO akan memberikan manfaat strategis bagi Turki terutama dalam hal keamanan dan dukungan dalam isu-isu strategis seperti masalah Kurdi dan kehadiran Rusia di wilayah tersebut sehingga membantu mengurangi ketegangan antara Turki dan Rusia (Tuncer, 2022).

Kedua, Ismail Kose dalam tulisannya berjudul “Challenges to NATO’s Fifth Enlargement Round: Turkey’s Attitude Towards Romania’s Admission” menjelaskan kebijakan Turki dalam mendukung bergabungnya Rumania di NATO dipengaruhi oleh faktor geopolitik, keamanan regional, dan kepentingan strategis. Keberadaan Rumania di NATO akan memperluas kehadiran NATO di wilayah Balkan dan dapat mengubah dinamika politik di kawasan tersebut. Bergabungnya Rumania ke dalam NATO akan mengurangi kekhawatiran Turki terhadap pengaruh Rusia di kawasan. Turki menganggap keanggotaan Rumania di NATO tidak membahayakan kepentingan Turki di Siprus atau memperburuk hubungan mereka dengan Yunani (Köse, 2015).

Ketiga, Angela M. Ene dalam tulisannya berjudul “The Role of Turkey in the Perspective of NATO’s Extension Policies in South-Eastern Europe” menjelaskan kebijakan Turki terkait perluasan NATO yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan keamanan regional. Ene menjelaskan bahwa peran Turki dalam kebijakan perluasan NATO di Eropa Tenggara sangat penting dan strategis. Turki merupakan anggota penting NATO yang memiliki kontribusi signifikan dalam operasi dan misi NATO di luar wilayah NATO. Selain itu Turki memiliki posisi strategis yang penting di Eropa Tenggara. Terlebih lagi Turki juga berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan

negara-negara di Eropa Tenggara yang sejalan dengan kebijakan NATO untuk memperluas hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut. Peran Turki dalam kebijakan perluasan NATO di Eropa Tenggara tidak hanya sebatas memberikan manfaat bagi NATO tetapi juga meningkatkan keamanan dan stabilitas di Eropa Tenggara serta memberikan manfaat bagi Turki dalam konteks kepentingan nasional (Ene, 2018).

Keempat, Ali L. Karaosmanoglu dalam tulisannya berjudul “NATO Enlargement and the South: A Turkish Perspective” menjelaskan sikap Turki yang skeptis menyangkut kebijakan perluasan NATO ke arah Selatan yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kepentingan strategis. Turki mendukung perluasan NATO ke Selatan (Timur Tengah, Mediterania, Asia Tengah, Kaukasus Selatan, dan Kawasan Laut Hitam) karena dapat meningkatkan stabilitas mengingat ketidakstabilan politik dan konflik yang sering terjadi di kawasan tersebut. Selain itu Turki percaya bahwa dengan memperluas cakupan NATO ke Selatan mereka dapat menawarkan perlindungan dan memberikan keamanan bagi negara-negara di wilayah tersebut.

Namun Turki juga memiliki keprihatinan tentang dampak dari perluasan NATO ke wilayah tersebut terhadap kepentingan nasional mereka. Salah satu perhatian utama adalah kemungkinan konflik regional di wilayah tersebut dapat mengundang NATO untuk terlibat dalam konflik yang lebih luas dan melibatkan negara-negara NATO lainnya. Turki khawatir perluasan NATO ke Selatan dapat mempercepat pengambilan keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan nasional Turki. Lebih jauh Turki juga merasa perluasan NATO ke Selatan dapat menyebabkan kerugian secara geopolitik bagi mereka karena kehadiran NATO yang lebih kuat di wilayah Selatan akan mengancam pengaruh Turki di kawasan dan dikhawatirkan negara-negara di kawasan akan membuat keputusan yang memperkuat kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan Turki (Karaosmanoglu, 1999).

Kelima, Michael M. Gunter dalam tulisannya berjudul “Some Implications of Sweden and Finland Joining NATO” menjelaskan sikap Turki yang skeptis terhadap kebijakan perluasan NATO ke kawasan Baltik yang dipengaruhi oleh faktor kepentingan strategis. Turki menentang perluasan NATO ke kawasan Baltik terkait dengan bergabungnya Finlandia ke dalam NATO. Turki menganggap keanggotaan Finlandia di NATO akan mengancam keamanan nasional Turki mengingat kedua negara berkonflik menyangkut persoalan Organisasi Teroris Kurdi (PKK) beserta afiliasi PYD & YPG serta Jaringan Teroris Fetullah Gulen (FETO, *Fetullah Gulen Terrorist Network*) dan embargo persenjataan. Finlandia dituduh mendukung keberadaan kelompok teroris tersebut baik secara domestik maupun internasional dengan memberikan perlindungan dan pendanaan. Selain persoalan terorisme, persoalan embargo persenjataan juga menjadi hambatan bergabungnya Finlandia ke dalam NATO. Finlandia menjatuhkan sanksi embargo atas agresivitas Turki di Timur Tengah karena dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM) (Gunter, 2022).

Berdasarkan perdebatan akademis di atas mengenai kebijakan pertahanan Turki terkait perluasan NATO, penelitian ini ingin mengajukan alternatif penjelasan atas kebijakan pertahanan Turki terkait perluasan NATO dipengaruhi oleh faktor reputasi. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh faktor reputasi Turki sebagai anggota NATO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis (Creswell & Creswell, 2022) yang ditujukan untuk menganalisis peran reputasi Turki sebagai anggota NATO dalam memengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Pengumpulan data diperoleh dari sumber sekunder, yakni jurnal, laporan, situs resmi, dan sumber internet lainnya. Sedangkan reduksi data dilakukan dengan cara menelaah data yang dikumpulkan untuk dipilih sesuai dengan topik penelitian ini. Selanjutnya dilakukan tahap penyajian data dalam bentuk narasi. Terakhir penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada elaborasi teori reputasi Jonathan Mercer.

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, penulis menggunakan Teori Reputasi Jonathan Mercer untuk menganalisis peran reputasi dalam memengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO. Mercer dalam bukunya berjudul *“Reputation and International Politics”* memperkenalkan teori reputasi dalam kajian hubungan internasional. Teori ini ditujukan untuk menganalisis peran reputasi dalam memahami dinamika interaksi antarnegara dalam politik internasional karena dapat memengaruhi keputusan dan perilaku negara.

Menurut Mercer, reputasi diartikan sebagai persepsi umum tentang karakter dan perilaku suatu negara yang dibentuk oleh aktor-aktor internasional terhadap tindakan-tindakan negara tersebut di masa lalu. Reputasi dapat menjadi aset penting bagi suatu negara karena dapat memengaruhi persepsi negara tersebut oleh negara-negara lain dan membentuk ekspektasi terhadap perilaku masa depan. Maka dari itu, reputasi memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan internasional baik dalam konteks diplomasi, negosiasi, kebijakan luar negeri maupun dalam upaya mempertahankan atau memperoleh kekuasaan.

Reputasi dapat memengaruhi keputusan dan tindakan negara melalui mekanisme kepercayaan dan intimidasi. Kepercayaan dihasilkan ketika reputasi positif negara mampu meyakinkan aktor internasional lain bahwa negara tersebut akan mematuhi komitmen dan janji-janji yang ada. Di sisi lain, reputasi negatif dapat digunakan untuk mengintimidasi aktor lain dan mendorong negara lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan negara yang memiliki reputasi tersebut.

Mercer menggambarkan reputasi sebagai salah satu sumber kekuasaan yang halus tetapi penting dalam politik internasional. Lebih jauh, Mercer menganalisis bagaimana negara-negara berusaha untuk membangun, mempertahankan atau memperbaiki reputasi mereka. Negara dapat menggunakan berbagai strategi seperti kerja sama internasional, penggunaan kekuatan militer, diplomasi publik, partisipasi dalam organisasi internasional atau mematuhi norma-norma internasional untuk memengaruhi persepsi dan reputasi mereka di arena internasional.

Teori reputasi Mercer mengasumsikan bahwa negara-negara memiliki insentif untuk mempertahankan reputasi mereka karena reputasi yang baik atau buruk dapat memengaruhi persepsi negara lain terhadap mereka. Reputasi yang baik dapat memberikan keuntungan diplomasi, kredibilitas, kepercayaan, dan kolaborasi dengan negara-negara lain. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat mengurangi kepercayaan, mempersempit peluang kerja sama, dan bahkan menghadirkan ancaman atas keamanan nasional. Negara-negara juga dapat mengancam untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara lain yang mencemarkan reputasi mereka (Mercer, 1996).

Teori ini juga mengemukakan bahwa negara-negara cenderung berperilaku secara konsisten sesuai dengan reputasi yang mereka miliki. Negara-negara dapat mempertimbangkan reputasi mereka saat mengambil keputusan terutama dalam konteks tindakan-tindakan yang dapat berdampak signifikan terhadap reputasi mereka. Ketika reputasi terbangun maka negara tersebut akan berusaha untuk memelihara dan memperbaiki reputasinya dengan mempertahankan perilaku yang konsisten dengan citra yang diharapkan oleh negara-negara lain. Suatu negara yang memiliki reputasi yang baik akan cenderung mendapatkan manfaat dalam interaksi dengan negara-negara lain karena negara-negara lain akan cenderung lebih percaya, menghormati, berpotensi untuk membentuk aliansi atau kerja sama dengannya, dan lebih mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam interaksi dengan negara lain. Sebaliknya, suatu negara dengan reputasi yang buruk dapat mengalami berbagai konsekuensi negatif seperti isolasi, penolakan kerja sama, ancaman keamanan, dan bahkan dihadapkan pada sanksi atau ketidakpercayaan dari komunitas internasional yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan politik.

Mercer juga mengemukakan bahwa reputasi dapat memengaruhi strategi kebijakan luar negeri serta dapat memiliki efek penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Negara dengan reputasi buruk mungkin mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih defensif atau agresif dalam upaya untuk membuktikan komitmen terhadap tujuan nasionalnya atau untuk mengubah persepsi negatif tentang mereka. Sementara negara dengan reputasi baik cenderung mengambil posisi yang kooperatif dan mencari cara untuk mempertahankan reputasi yang positif dengan berperilaku sesuai dengan norma-norma internasional. Lebih lanjut, Mercer menggarisbawahi peran penting informasi dan komunikasi dalam pembentukan dan pemeliharaan reputasi. Negara-negara sering menggunakan berbagai saluran komunikasi termasuk diplomasi publik dan media untuk memperkuat atau memperbaiki reputasi mereka dan memengaruhi persepsi negara lain terhadap mereka.

Dalam praktiknya, teori reputasi Mercer memberikan pemahaman yang bermanfaat dalam menganalisis konflik, kerjasama, dan dinamika hubungan internasional. Dengan mempertimbangkan dampak reputasi, dapat dijelaskan: mengapa negara-negara bertindak berdasarkan cara-cara tertentu; bagaimana reputasi dapat memengaruhi keputusan dan strategi kebijakan luar negeri; dan bagaimana negara-negara dapat memanipulasi atau memanfaatkan reputasi mereka untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka. Lebih lanjut, Mercer menyoroti pentingnya reputasi dalam konflik dan perang. Negara yang memiliki reputasi yang kuat dapat dianggap sebagai lawan yang tangguh sehingga negara lain mungkin akan

mempertimbangkan kembali risiko melibatkan diri dalam konflik dengan negara tersebut (Mercer, 1997).

Lebih jauh, teori reputasi Mercer mengelaborasi beberapa dimensi yang menggambarkan bagaimana reputasi negara atau aktor internasional dibentuk dan dipersepsikan oleh aktor-aktor lain. Berikut adalah beberapa dimensi, antara lain, *pertama*, kepercayaan. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana aktor lain memiliki kepercayaan terhadap negara atau aktor internasional tersebut. Jika negara atau aktor internasional memiliki reputasi yang baik dalam hal kepercayaan maka aktor-aktor lain akan cenderung percaya dan mempercayai kata-kata atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau aktor tersebut.

Kedua, kepatuhan. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana negara atau aktor internasional tersebut dilihat sebagai patuh terhadap norma-norma internasional dan komitmen yang telah dijanjikan sebelumnya. Jika negara atau aktor internasional terbukti selalu memenuhi komitmen dan bersikap patuh terhadap norma internasional maka aktor-aktor lain akan melihatnya sebagai negara yang patuh dan dapat diandalkan. *Ketiga*, kredibilitas. Dimensi ini mencakup sejauh mana negara atau aktor internasional ini dianggap memiliki kredibilitas dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diungkapkan atau dijanjikan. Jika negara atau aktor internasional sering kali memenuhi janji-janji dan tindakan yang diungkapkan maka reputasinya akan meningkat sebagai aktor yang dapat dipercaya dan mempunyai kredibilitas tinggi.

Keempat, kompetensi. Dimensi ini mengacu pada reputasi negara atau aktor internasional sebagai ahli di bidang tertentu atau sebagai pemimpin dalam menangani isu-isu tertentu. Jika negara atau aktor internasional terlihat memiliki keahlian dan keahlian yang baik dalam bidang tertentu maka reputasinya akan meningkat sebagai negara yang kompeten dan kompetitif dalam hal tersebut. *Kelima*, konsistensi. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana negara atau aktor internasional ini tetap konsisten dalam perilaku dan tindakannya sepanjang waktu. Jika negara atau aktor internasional memiliki reputasi yang konsisten artinya mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijanjikan maka reputasinya akan meningkat sebagai aktor yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi.

Keenam, transparansi. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana negara atau aktor internasional ini terbuka dan transparan dalam tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Jika negara atau aktor internasional terlihat transparan dan terbuka dalam tindakan dan kebijakan yang diambilnya maka reputasinya akan meningkat sebagai negara yang transparan dan dapat dipercaya. Terakhir, *ketujuh*, responsivitas. Dimensi ini mencakup sejauh mana negara atau aktor internasional ini merespons dan merespon kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh aktor lain. Jika negara atau aktor internasional terlihat responsif terhadap masalah dan kebutuhan aktor lain maka reputasinya akan meningkat sebagai negara yang responsif dan peduli. Keseluruhan dimensi-dimensi ini saling berhubungan dan membentuk reputasi negara atau aktor internasional. Reputasi bisa positif atau negatif tergantung pada bagaimana aktor-aktor lain mempersepsikan dan menilai negara atau aktor internasional tersebut dalam dimensi-dimensi tersebut (Copeland, 1997).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pertahanan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh faktor reputasi Turki sebagai anggota NATO. Turki diakui sebagai sekutu strategis NATO yang andal karena

berkomitmen penuh pada nilai dan prinsip NATO. Namun reputasi tersebut memperoleh tantangan karena berbagai macam persoalan politik domestik dan kebijakan pertahanan yang kontraproduktif dengan garis kebijakan pertahanan NATO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap dan kebijakan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh faktor reputasi Turki sebagai anggota NATO. Reputasi Turki sebagai “sekutu strategis NATO yang andal” (*reliable ally*) mengalami pergeseran seiring perubahan struktur politik domestik yang otoriter dan kebijakan pertahanan yang anti-NATO. Kebijakan pertahanan Turki di bawah rezim pemerintahan Recep Tayyip Erdogan bertransformasi dari kebijakan pertahanan pro-Barat (*traditional Western-aligned foreign policy*) menjadi proaktif dan berhaluan anti-Barat (*anti-Western foreign policy*) yang berdampak serius terhadap hubungan Turki dengan aliansi NATO (Cook, 2023; Danforth & Stein, 2023).

Situasi ini menciptakan krisis kepercayaan, kepatuhan, dan kredibilitas atas keanggotaan Turki di NATO. Sejumlah negara anggota NATO mempersoalkan komitmen Turki pada aliansi yang dianggap semakin memudar sehingga Turki dipersepsikan sebagai “sekutu strategis NATO yang dipertanyakan” (*questionable ally*) dan bahkan dilabeli sebagai sekutu korosif NATO (*corrosive ally*). Dukungan Turki terhadap keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh motif Turki untuk mempertahankan dan memperbaiki reputasinya sebagai “sekutu strategis NATO yang andal” yang berkomitmen penuh pada nilai dan prinsip NATO sebagai upaya menciptakan stabilitas regional dan keamanan di Eropa.

REPUTASI TURKI SEBAGAI SEKUTU STRATEGIS NATO YANG ANDAL

Reputasi Turki sebagai “sekutu strategis NATO yang andal” (*reliable ally*) dapat ditelusuri kembali sejak keterlibatannya dalam organisasi tersebut pada tahun 1952. Salah satu alasan utama mengapa Turki dianggap sebagai sekutu strategis NATO adalah lokasinya yang strategis. Turki terletak di persimpangan antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Secara geografis negara ini berbatasan langsung dengan sejumlah negara-negara yang memiliki posisi strategis seperti Iran, Irak, Suriah, dan Rusia. Keberadaan Turki di dekat kawasan geografis yang sensitif ini menjadikannya sebagai negara yang memiliki pengaruh dan keterlibatan penting dalam berbagai isu keamanan regional dan global. Negara ini juga menjadi pintu gerbang antara Timur dan Barat dan memiliki akses langsung ke Selat Bosphorus yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Tengah. Ini memungkinkan Turki untuk mengawasi jalur perdagangan penting dan menjadi kekuatan penyeimbang dalam distribusi kekuatan di kawasan ini. Selain itu Turki juga memiliki kondisi geografis yang strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Timur Tengah sehingga memainkan peran kunci dalam mengamankan jalur pasokan dan logistik NATO (Bölme, 2022; Yilmaz, 2012).

Sejak bergabung dengan NATO Turki diakui sebagai salah satu sekutu strategis yang andal karena berperan aktif dalam menjaga stabilitas regional dan keamanan di Eropa dan Timur Tengah. Negara ini memiliki kekuatan militer yang tangguh dan modern dengan kemampuan untuk berperang di darat, udara, dan laut. Bahkan Angkatan Bersenjata Turki diakui sebagai salah satu yang terbesar di NATO dengan personel yang terlatih dan peralatan tempur modern. Hal ini membuat Turki menjadi

kekuatan yang bisa diandalkan dalam mempertahankan wilayahnya sendiri serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas regional. Terlebih lagi negara ini juga menjadi tuan rumah bagi sejumlah pangkalan militer strategis yang digunakan oleh pasukan negara-negara anggota NATO seperti pangkalan udara dan pelabuhan laut yang menjadi tempat beroperasinya pasukan dari berbagai negara anggota NATO seperti halnya Pangkalan Udara Incirlik yang menjadi tempat penting dalam misi dan operasi NATO di kawasan (Cordesman, 2019).

Turki juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional di Mediterania dan Timur Tengah. Negara ini berbagi perbatasan dengan sejumlah tetangga yang memiliki situasi keamanan yang kompleks seperti Suriah dan Irak. Sebagai anggota NATO yang aktif Turki berkomitmen untuk berbagi beban dan tanggung jawab dalam memerangi terorisme, migrasi ilegal, dan ancaman keamanan transnasional lainnya guna menjaga keamanan dan stabilitas regional di kawasan. Turki juga memainkan peran penting dalam krisis migran di Eropa dengan menjadi titik transit utama bagi jutaan pengungsi Suriah yang mencari perlindungan di Eropa dan melakukan operasi militer untuk melawan kelompok teroris seperti ISIS dan PKK. Dalam menghadapi tantangan ini Turki telah bekerjasama dengan NATO dan anggota lain dalam berbagai operasi militer seperti patroli udara dan maritim di wilayah yang sensitif. Kontribusi Turki dalam upaya ini telah membantu mengurangi ancaman terhadap keamanan regional dan global (Seufert, 2020).

Sebagai anggota NATO yang aktif Turki telah berkontribusi secara signifikan dalam misi dan operasi NATO di berbagai wilayah termasuk Afghanistan, Bosnia, Kosovo, dan Libya yang bertujuan menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik di kawasan tersebut. Turki juga secara aktif mengirimkan pasukan ke Afghanistan pada tahun 2001 dan menjadi bagian dari misi pelatihan NATO yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keamanan Afghanistan. Selain itu Turki juga berperan penting dalam operasi penjagaan perdamaian di Kosovo pada tahun 1999 dan terlibat dalam operasi NATO di Libya pada tahun 2011 yang berkontribusi pada upaya NATO melawan terorisme internasional. Lebih jauh Turki juga memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai konflik seperti di Libya dan Suriah. Peran dan kontribusi Turki dalam misi dan operasi ini telah mendapatkan apresiasi dari sekutu-sekutu utama NATO.

Turki termasuk salah satu anggota NATO yang aktif dalam berbagai program NATO termasuk pelatihan dan latihan militer bersama. Ini membantu memperkuat keterampilan militer mereka serta membangun ikatan dan hubungan yang kuat dengan mitra NATO lainnya. Selain itu Turki juga menjadi tuan rumah dan berkontribusi dalam berbagai latihan militer NATO seperti latihan, musyawarah, dan kesiapsiagaan NATO. Ini menunjukkan komitmen Turki terhadap keamanan kolektif dan kemampuannya untuk beroperasi dengan sekutu NATO lainnya. Turki juga telah menjadi pusat latihan dan kolaborasi militer bagi anggota NATO lainnya. Negara ini sering kali menjadi tuan rumah untuk latihan militer berskala besar yang melibatkan pasukan dari negara-negara NATO lainnya. Ini memungkinkan Turki untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan interoperabilitas dengan sekutu-sekutu NATO lainnya. Kerjasama ini pada gilirannya memperkuat keseluruhan kemampuan NATO dalam menghadapi ancaman keamanan global. Hal ini memperkuat reputasi Turki sebagai sekutu strategis

NATO yang andal dalam membantu mempertahankan keamanan kolektif NATO (Kinacioğlu & Gürzel, 2013; Soekarba et al., 2019).

Selain dikenal andal, Turki juga diakui sebagai sekutu strategis NATO yang kredibel. Reputasi Turki sebagai sekutu strategis NATO yang kredibel tercermin dalam komitmen penuh negara ini terhadap prinsip-prinsip aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Turki telah mengikuti prosedur dan kewajiban yang ditetapkan oleh NATO seperti meningkatkan belanja pertahanan dan berkontribusi dalam kemampuan militer kolektif. Turki juga telah berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan negara anggota NATO lainnya. Hal ini memperkuat kredibilitas Turki sebagai sekutu strategis NATO yang berkomitmen penuh pada nilai-nilai dan tujuan NATO.

Selain berkontribusi dari segi militer, Turki juga berperan penting dalam memperkuat kerjasama politik dan keamanan NATO. Negara ini terus bekerjasama dengan sekutu NATO dalam mengatasi ancaman dan tantangan keamanan yang semakin kompleks. Turki diakui juga sebagai mitra penting di bidang intelijen dan informasi bagi NATO. Mereka memiliki jaringan intelijen yang luas dan kemampuan teknologi yang bisa digunakan untuk mendukung operasi aliansi. Turki juga berbagi informasi intelijen dengan sekutu NATO lainnya dalam upaya bersama melawan ancaman keamanan seperti terorisme internasional, proliferasi senjata, dan perang siber. Kerjasama intelijen ini sangat penting untuk pertukaran informasi dan analisis yang efektif dalam melawan ancaman bersama. Terlebih lagi Turki memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara di Timur Tengah dan Mediterania yang memungkinkan mereka untuk berperan sebagai fasilitator dalam dialog dan diplomasi untuk mencapai solusi damai (Bongiovanni, 2018; Cordesman, 2019).

Secara keseluruhan reputasi Turki sebagai sekutu strategis NATO yang andal termanifestasikan dalam peran penting mereka menjaga keamanan dan stabilitas regional di Eropa, Timur tengah, dan Mediterania yang berkontribusi aktif pada misi pertahanan kolektif NATO serta kepatuhan terhadap penghormatan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan HAM. Turki juga diakui sebagai sekutu strategis yang sangat berarti bagi NATO karena lokasinya yang strategis dan peran penting mereka dalam kerjasama intelijen serta suksesi misi perdamaian dan operasi militer NATO di seluruh dunia. Keberadaan Turki membantu memperkuat kehadiran dan peran NATO serta memberikan kekuatan dan stabilitas bagi aliansi.

PERGESERAN REPUTASI TURKI DI NATO

Reputasi Turki di NATO mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir. Turki dikenal luas memiliki reputasi sebagai “sekutu strategis NATO yang andal”. Namun perubahan struktur politik domestik yang otoriter serta kebijakan pertahanan Turki yang anti-NATO telah memengaruhi reputasinya sebagai anggota NATO. Turki dipersepsikan sebagai “sekutu strategis NATO yang dipertanyakan” (*questionable ally*) serta dicitrakan sebagai sekutu korosif (*corrosive ally*) dan bahkan destruktif (*destructive ally*) karena kebijakan pertahanan yang ambivalen dengan garis kebijakan NATO, defisit demokrasi, pelanggaran HAM, dan konflik kepentingan dengan negara-negara NATO (Bölme, 2022; Crowley & Erlanger, 2022; Oğuzlu, 2012b; Robinson, 2023).

Pertama, Turki menuai kritik internasional oleh berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) dan negara-negara Barat atas rendahnya kredibilitas pemerintah

dalam isu HAM, kebebasan berpendapat, dan tindakan militer yang kontroversial. Pasalnya Turki dituduh melakukan pelanggaran HAM secara sistematis seperti pengekangan kebebasan berbicara, pemberedelan media massa hingga penangkapan dan penindasan terhadap oposisi politik. Fenomena ini menunjukkan semakin kuatnya otoritarianisme Turki di bawah rezim pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beberapa negara anggota NATO bahkan menaruh keprihatinan yang mendalam terhadap ketidakhadiran demokrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Hal ini menyiratkan rendahnya tingkat kepatuhan Turki terhadap penghormatan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan aturan hukum yang dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar keanggotaan NATO. Tragedi ini menambah panjang reputasi negatif Turki dalam hal penghormatan terhadap HAM (Caman, 2021; Soekarba et al., 2019).

Kedua, selain persoalan demokrasi dan HAM, Turki juga menuai kecaman keras karena bersitegang dengan sejumlah negara anggota NATO. Selama beberapa tahun terakhir Turki terlibat konflik dengan negara-negara anggota NATO seperti Yunani. Salah satu sumber ketegangan utama adalah konflik antara Turki dan Yunani terkait dengan wilayah Laut Aegea dan pulau-pulau di sekitarnya. Yunani mengklaim bahwa Turki melanggar perbatasan dan wilayah kedaulatan mereka terutama terkait dengan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas alam. Turki di sisi lain berkeyakinan bahwa mereka memiliki hak untuk eksplorasi di wilayah tersebut berdasarkan perjanjian antara Turki dan Libya yang menetapkan batas maritim yang saling menguntungkan.

Sikap Turki ini bertentangan dengan prinsip berhubungan baik dengan sesama negara anggota NATO karena mengancam stabilitas internal dan menghambat kerjasama regional. Sebagai anggota NATO Turki perlu mencari jalan pemulihan hubungan yang baik dengan negara-negara ini dan menunjukkan komitmen untuk membangun kemitraan yang kuat di dalam aliansi karena berdampak secara luas pada hubungan Turki dengan negara-negara NATO lainnya dan dikhawatirkan menciptakan ketegangan politik yang lebih luas (Atrashkevich & Panarin, 2022; Kalkan, 2020).

Ketiga, intervensi militer Turki dalam konflik Suriah dan Libya. Pada tahun 2019 Turki melancarkan operasi yang disebut sebagai "operasi damai musim semi" di wilayah utara Suriah dengan tujuan mengusir kelompok Kurdi yang dianggap sebagai ancaman keamanan oleh pemerintah Turki. Operasi ini menyebabkan ketegangan dengan negara-negara NATO lainnya seperti Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya merupakan sekutu dalam memerangi ISIS di Suriah karena AS memiliki kebijakan yang berbeda terhadap kelompok Kurdi di wilayah tersebut.

Lebih jauh Turki juga memiliki perbedaan pandangan dengan negara-negara NATO lainnya dalam hal perlindungan dan kekuatan kelompok Kurdi terutama Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Turki telah lama menghadapi konflik dan terorisme yang dilakukan oleh PKK yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara termasuk Turki sendiri. Namun beberapa negara anggota NATO lainnya tidak menganggap PKK sebagai organisasi teroris dan memiliki hubungan dekat dengan kelompok Kurdi di Suriah seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dianggap memiliki afiliasi dengan PKK. Hal ini menjadi pemicu ketegangan antara Turki dan negara-negara NATO lainnya (Erdogan, 2022; Mousseau et al., 2019).

Selain isu Suriah, Turki juga berselisih paham dengan negara-negara NATO terkait dengan operasi militer NATO di Libya. Turki mengancam memblokir rencana atau operasi militer yang diusulkan oleh negara-negara NATO lainnya jika dinilai bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional Turki. Hal ini terjadi dalam konteks perang saudara di Libya dan ketika negara-negara NATO lainnya menyepakati rencana untuk memperkuat kehadiran militer NATO di Laut Aegea sebagai tanggapan terhadap aksi provokatif Turki di wilayah tersebut. Turki juga memainkan peran aktif dalam konflik di Libya dengan mendukung Pemerintah Persatuan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli melawan komandan milisi Khalifa Haftar yang berbasis di Tobruk. Beberapa anggota NATO seperti Perancis mengecam intervensi Turki di Libya dan perannya dalam eskalasi konflik tersebut (Kara, 2023).

Keempat, reputasi Turki semakin terpuruk karena kebijakan migrasi yang kontroversial dan sering kali dilihat sebagai upaya untuk mendikte Uni Eropa dan negara-negara NATO lainnya. Perselisihan berkecambuk ketika terjadi krisis migran di perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria pada awal tahun 2020. Turki mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menahan imigran yang ingin pergi ke Eropa yang menyebabkan lonjakan massa imigran yang berusaha menyeberang perbatasan. Alhasil Yunani dan Bulgaria menolak kedatangan imigran sehingga memicu situasi krisis dan meningkatkan ketegangan antara Turki dan anggota NATO lainnya di wilayah tersebut (Grigoriadis, 2022; Oztig, 2020).

Kelima, Turki telah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir yang menuai kecaman keras dari sekutu-sekutu NATO. Kedekatan Turki dengan Rusia salah satunya disebabkan oleh ketergantungan negara itu terhadap suplai alutsista dari Rusia. Salah satu kebijakan kontroversial Turki adalah mengakuisisi sistem rudal pertahanan S-400 dari Rusia yang memicu ketegangan antara Turki dan NATO karena ambivalen dengan kebijakan NATO yang mendorong integrasi pertahanan antaranggota dengan sistem NATO seperti sistem rudal pertahanan Patriot buatan AS.

Sekutu-sekutu NATO diharuskan membeli peralatan pertahanan dari negara-negara NATO lainnya yang menjadi mitra strategis dalam keamanan Eropa. AS dan beberapa sekutu NATO lainnya menganggap manuver Turki ini sebagai ancaman terhadap keamanan NATO dan mengklaim bahwa sistem tersebut tidak kompatibel dengan sistem pertahanan NATO. Ini memicu sanksi ekonomi dari AS dan perdebatan dalam NATO tentang peran Turki dalam aliansi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip penting yang dipegang oleh NATO (Kara, 2023; Robinson, 2023).

Keenam, reputasi Turki sebagai anggota NATO semakin tergerus karena interferensi dalam urusan politik domestik negara lain. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengintervensi persoalan politik dan urusan domestik negara-negara lain. Tindakan interferensi dilakukan Turki dalam beberapa konflik regional seperti di Suriah dan Libya, isu Siprus, dan konflik Azerbaijan-Armenia. Sejak tahun 2011 Turki telah terlibat secara aktif dalam konflik Suriah. Turki telah memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak Suriah terutama kelompok-kelompok yang membentuk Tentara Nasional Suriah. Turki juga melakukan operasi militer di Suriah seperti Operasi Perisai Eufrat pada tahun 2016 dan Operasi Cabar Olive pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mengusir organisasi teroris PKK (*Kurdistan Workers' Party*) dan juga kelompok militan Kurdi lainnya dari perbatasan Turki.

Sementara di Libya, Turki juga terlibat dalam konflik Libya dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di bawah kepemimpinan Fayed al-Sarraj melawan kelompok pemberontak yang menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut. Turki telah mengirimkan pasukan militer ke Libya untuk membantu GNA serta melancarkan serangan Udara terhadap pihak oposisi (Seufert, 2020). Sedangkan dalam isu Siprus, Turki telah terlibat dalam konflik Siprus sejak invasi Turki pada tahun 1974 yang mengakibatkan terpecahnya pulau tersebut menjadi dua bagian, yaitu Republik Siprus dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC). Namun keberadaan Republik Turki Siprus Utara hanya diakui secara internasional oleh tiga negara termasuk Turki, Libya, dan Indonesia. Turki masih mempertahankan pasukan militer di Turki Siprus Utara dan terlibat dalam upaya mediasi untuk mencari solusi politik bagi konflik ini (Acikmese & Triantaphyllou, 2012; Suleymanov, 2019).

Turki juga terlibat dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini Turki memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada Azerbaijan serta melibatkan diri dalam manuver militer di perbatasan Armenia dan pengiriman pasukan ke wilayah tersebut. Turki juga dikritik karena diduga melibatkan kelompok militan Suriah untuk berperang di pihak Azerbaijan. Interferensi Turki dalam urusan domestik negara lain telah menuai beragam tanggapan dan kontroversi internasional. Beberapa pihak melihat campur tangan Turki sebagai langkah yang sah untuk melindungi kepentingan nasional Turki atau mendukung pihak yang dianggap saudara seiman atau sekutu. Namun lainnya mengkritik campur tangan Turki sebagai perampasan kedaulatan negara-negara lain dan melanggar hukum internasional (Isachenko, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir beberapa anggota NATO mempersoalkan kualitas komitmen Turki terhadap aliansi dan apakah negara ini masih memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari NATO. Hal ini menegaskan kemerosotan reputasi Turki sebagai anggota aliansi yang dipersepsikan sebagai "sekutu strategis NATO yang dipertanyakan" (*questionable ally*). Meskipun Turki tetap menjadi anggota NATO yang vital secara geopolitik namun reputasinya sebagai anggota aliansi mengalami perubahan secara negatif karena eksekusi perubahan politik domestik yang otoritarian dan ambivalensi kebijakan luar negeri yang menantang NATO (Crowley & Erlanger, 2022).

Ketegangan ini menyebabkan perdebatan dan krisis kepercayaan antara Turki dan beberapa negara anggota NATO lainnya dan dikhawatirkan mengancam soliditas dan kohesivitas aliansi. Meskipun semua negara anggota NATO memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan kolektif namun perbedaan dalam interpretasi dan kepentingan nasional masing-masing negara dapat memicu konflik dan ketegangan yang berlarut-larut (Oğuzlu, 2012a).

RESTORASI REPUTASI TURKI DAN DUKUNGAN KEANGGOTAAN FINLANDIA DI NATO

Perubahan sikap dan kebijakan pertahanan Turki terkait dukungan keanggotaan Finlandia di NATO tidak dapat dipisahkan dari upaya Turki untuk merestorasi reputasinya sebagai sekutu strategis NATO yang andal. Sikap Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan kembali dari negara-negara sekutu NATO. Turki

dihadapkan pada krisis kepercayaan, kepatuhan, kredibilitas, konsistensi, dan responsivitas karena kebijakan pertahanan yang kontroversial dan bertentangan dengan nilai dan prinsip NATO (Crowley & Erlanger, 2022). Oleh karena itu Turki berupaya bekerjasama dengan negara anggota NATO lainnya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan membangun kepercayaan kolektif sehingga “badai krisis” yang dialami Turki dapat direstorasi. Hal ini memungkinkan Turki untuk mempertahankan sentralitasnya dalam misi perdamaian dan operasi militer serta tanggung jawab global lainnya sebagai bagian dari NATO (Ashford & Kroenig, 2023).

Turki mendukung sepenuhnya keanggotaan Finlandia di NATO dengan meratifikasi akses keanggotaan Finlandia di NATO pada 30 Maret 2023 oleh Parlemen Turki setelah sebelumnya pada 27 Maret 2023 Parlemen Hungaria juga meratifikasi akses keanggotaan Finlandia di NATO. Tindakan ratifikasi ini menandai pengesahan keanggotaan Finlandia di NATO dan secara resmi diakui sebagai anggota aliansi NATO ke-31 pada 4 April 2023. Turki dan Hungaria merupakan dua negara sekutu NATO yang belum meratifikasi akses keanggotaan Finlandia di NATO (Hernandez, 2023).

Sikap Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO sebagai langkah Turki menunjukkan komitmen kuatnya terhadap nilai dan prinsip NATO dalam mendukung pertahanan kolektif sebagai upaya menciptakan stabilitas regional dan keamanan di Eropa. Turki telah menjadi sekutu NATO selama lebih dari enam puluh tahun dan telah berbagi tanggung jawab dalam menjaga kepentingan dan keamanan negara-negara anggota NATO. Dukungan Turki terhadap bergabungnya Finlandia ke dalam NATO dapat menjadi bukti kesiapan dan kesediaannya untuk memperkuat aliansi tersebut. Langkah ini juga diartikan sebagai upaya menangkal persepsi skeptis yang melekat erat pada Turki terkait perluasan NATO. Kebijakan ini juga dianggap konsisten dengan komitmen NATO untuk memperkuat pertahanan kolektif dan kerjasama dalam isu keamanan global (Alaranta, 2022).

Selain itu dukungan Turki terhadap keanggotaan Finlandia di NATO ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Turki terhadap prinsip berhubungan baik dengan negara-negara sekutu NATO. Prinsip ini berkaitan langsung soliditas dan kohesivitas internal NATO. Bergabungnya Finlandia ke dalam NATO sebagai langkah Turki memperbaiki hubungan bilateral mengingat kedua negara sejak lama terlibat dalam konflik. Terlebih lagi tindakan interferensi Turki dalam urusan politik dan domestik Finlandia terkait isu Kurdi semakin memperburuk hubungan kedua negara selain diterpa persoalan sanksi embargo persenjataan. Tidak mengherankan Turki dituding melanggar prinsip non-interferensi NATO karena mencampuri urusan politik dan domestik Finlandia. Dukungan Turki terhadap keanggotaan Finlandia di NATO menunjukkan komitmen kuat untuk mempromosikan stabilitas dan kerja sama regional mengingat Finlandia sejak lama diakui sebagai mitra strategis dalam berbagai misi dan operasi NATO. Lebih jauh keberadaan Finlandia di NATO sebagai bentuk komitmen Turki untuk memperkuat kerjasama politik, pertahanan, dan ekonomi dengan Finlandia guna memberikan dorongan positif bagi kerjasama bilateral di antara kedua negara (Erkoyun & Ozkan, 2023).

Turki sejak lama diakui memainkan peran aktif sebagai pemimpin regional dalam memastikan stabilitas dan keamanan regional di Eropa dan Timur Tengah. Ini menunjukkan kompetensi Turki sebagai penjaga keamanan regional sekaligus global

karena memiliki posisi geopolitik yang strategis dan penting bagi NATO (Robinson, 2023). Melalui dukungannya terhadap keanggotaan Finlandia di NATO menunjukkan responsivitas Turki dalam mempromosikan kepentingan negara-negara Eropa Utara. Langkah ini semakin memperkuat rekognisi Turki sebagai pemain utama dalam mengatasi tantangan keamanan regional dan global di kawasan. Hal ini memperkuat kembali reputasi Turki sebagai sekutu strategis NATO yang andal karena responsivitasnya dalam memajukan kepentingan negara-negara Nordik (Detsch, 2022; Kayali, 2023).

Dukungan Turki terhadap keanggotaan Finlandia di NATO juga dipandang sebagai langkah Turki menunjukkan konsistensinya dalam mendorong kerjasama regional dan multilateralisme yang sesuai dengan prinsip dan tujuan NATO. Turki menilai keberadaan Finlandia sebagai sekutu NATO memiliki kompatibilitas dengan *platform* kebijakan luar negeri Turki yang dianggap sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai Turki seperti kepentingan dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat solidaritas dalam pertahanan kolektif yang mana merupakan nilai-nilai dan tujuan NATO. Hal ini dapat memperkuat posisi dan pengaruh Turki dalam aliansi (Cagaptay et al., 2022; Gardner & Durbin, 2023).

Lebih jauh, sikap Turki mendukung bergabungnya Finlandia ke dalam NATO mengirimkan sinyalemen bahwa Turki tetap berkomitmen penuh pada aliansi NATO dan dapat dipercaya dalam hal keamanan dan pertahanan di tengah terpaan isu kedekatan Turki dengan Rusia. Dukungan Turki ini mempertaruhkan risiko peningkatan ketegangan dengan Rusia yang dapat memengaruhi hubungan politik, ekonomi, energi, dan keamanan-pertahanan di antara kedua negara. Rusia juga telah menunjukkan sikap yang keras dalam menanggapi perluasan NATO ke wilayah-wilayah dekat perbatasan Rusia seperti yang terjadi dengan negara-negara Baltik. Namun Turki tetap mendukung ekspansi NATO ke Eropa Utara sebagai bentuk komitmen mereka terhadap keamanan dan stabilitas regional (Bayer, 2023b).

Terakhir, sikap Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dapat memperkuat legitimasi dan otoritas Turki di tingkat internasional. Dengan mendukung bergabungnya Finlandia ke dalam NATO menunjukkan bahwa Turki merupakan aktor yang progresif dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan keamanan kolektif internasional (Coskun, 2023). Hal ini dapat membantu memperkuat posisi Turki dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

Selain itu dengan memberikan dukungan keanggotaan bagi Finlandia dapat memperkuat posisi Turki sebagai aktor penting dalam hubungan internasional dan diakui sebagai anggota yang berperan aktif dalam aliansi NATO. Reputasi Turki sebagai negara yang cenderung mendukung integrasi regional memberikan dampak positif pada kualitas dan penguatan diplomasi mereka dengan anggota NATO lainnya serta dengan negara-negara di Eropa. Turki ingin menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa mereka adalah anggota NATO yang solid dan dapat diandalkan serta masih berkomitmen terhadap perluasan NATO. Melalui dukungan ini Turki dapat membangun dan memperkuat reputasinya sebagai negara yang berkomitmen pada keamanan kolektif, meningkatkan posisinya di dalam aliansi serta memperkuat legitimasi dan otoritasnya di tingkat internasional (Bayer, 2023b; Mitchell, 2023).

KESIMPULAN

Perubahan sikap dan kebijakan Turki mendukung keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh faktor reputasi Turki sebagai sekutu strategis NATO yang andal. Sejak bergabung dengan NATO Turki diakui sebagai sekutu strategis yang andal karena peran yang tak tergantikan dalam misi perdamaian dan operasi militer NATO di seluruh dunia. Namun reputasi ini mengalami pergeseran seiring perubahan struktur politik domestik yang otoriter dan kebijakan pertahanan yang anti-NATO. Berbagai macam persoalan domestik seperti pengekangan kebebasan berbicara, pembatasan kebebasan pers, pemberedelan media massa, penangkapan aktivis hak asasi manusia (HAM) hingga penindasan terhadap oposisi politik menuai kecaman keras negara anggota NATO.

Kebijakan pertahanan Turki dianggap tidak konsisten dengan garis kebijakan NATO. Sejumlah kebijakan Turki menuai kontroversi seperti operasi militer Turki di Suriah dan Libya; interferensi Turki dalam beberapa konflik regional seperti isu Siprus dan konflik Azerbaijan-Armenia; akuisisi sistem rudal pertahanan taktis S-400 Rusia; penolakan Turki menampung imigran asal Timur Tengah; dan persetujuan Turki dengan sejumlah negara anggota NATO. Kebijakan kontroversial ini menyebabkan Turki kehilangan kepercayaan, kepatuhan, kredibilitas, kompetensi, dan konsistensi sebagai sekutu strategis NATO. Sejumlah negara anggota NATO mempersoalkan komitmen Turki pada aliansi yang dianggap semakin memudar sehingga Turki dipersepsikan sebagai “sekutu strategis NATO yang dipertanyakan”. Dukungan Turki terhadap keanggotaan Finlandia di NATO dipengaruhi oleh upaya Turki untuk mempertahankan dan memperbaiki reputasinya sebagai “sekutu strategis NATO yang andal” yang berkomitmen penuh pada nilai dan prinsip NATO sebagai upaya menciptakan stabilitas regional dan keamanan di Eropa.

REFERENSI

- Acikmese, S. A., & Triantaphyllou, D. (2012). The NATO-EU-Turkey trilogy: The impact of the Cyprus conundrum. *Journal of Southeast European and Black Sea*, 12(4). <https://doi.org/10.1080/14683857.2012.741846>
- Alaranta, T. (2022). NATO's Nordic Enlargement and Turkey's Reservations: Trilateral Memorandum of Understanding in the Context of Turkey's Wider Strategic Interests. *FIIA Briefing Paper*, 349. https://www.fii.fi/wp-content/uploads/2022/09/bp349_natos-nordic-enlargement-and-turkeys-reservations.pdf
- Arter, D. (1996). Finland: From neutrality to NATO? *European Security*, 5(4). <https://doi.org/10.1080/09662839608407292>
- Arter, D. (2023). From Finlandisation and post-Finlandisation to the end of Finlandisation? Finland's road to a NATO application. *European Security*, 32(2), 171–189. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2113062>
- Ashford, E., & Kroenig, M. (2023, January 13). *Is Erdogan's Turkey Weakening NATO?* <https://foreignpolicy.com/2023/01/13/turkey-erdogan-nato-crucial-corrosive-ally/>
- Atrashkevich, A. N., & Panarin, S. A. (2022). How Conflicts between Greece and Turkey in the 19th – Early 20th Centuries Affected the Formation of Historical Memory in Both States. *Vostok (Oriens)*, 2022(1), 184–195.

- <https://doi.org/10.31857/S086919080018177-1>
- Averre, D. (1998). NATO expansion and Russian national interests. *European Security*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/09662839808407348>
- Bandow, D. (2022, July 14). *Why is Turkey Still in NATO?* <https://www.cato.org/commentary/why-turkey-still-nato>
- Bayer, L. (2023a, March 17). *Turkey, Hungary to Approve Finland's NATO Membership.* <https://www.politico.eu/article/turkey-approve-finland-nato-membership-sweden-edrojan/>
- Bayer, L. (2023b, April 3). *Turkey is the Headache NATO Needs.* <https://www.politico.eu/article/turkey-nato-sweden-finland-is-the-headache-nato-needs/>
- Bölme, S. M. (2022). NATO-Türkiye Relations: From Irreplaceable Partner to Questionable Ally. *Studia Europejskie — Studies in European Affairs*, 93–116. <https://doi.org/10.33067/se.3.2022.5>
- Bongiovanni, F. M. (2018). Turkey: the Nato Alliance's Wild Card. *Turkish Policy Quarterly*, 17(2), 53–62. <http://turkishpolicy.com/article/919/turkey-the-nato-alliances-wild-card>
- Cagaptay, S., Singh, M., & Akgundogdu, S. (2022, November 22). *Will Turkey Ratify Sweden and Finland's NATO Accession?* <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/will-turkey-ratify-sweden-and-finlands-nato-accession>
- Caman, M. E. (2021). Authoritarianization and Human Rights in Turkey: How the AKP Legitimizes Human Rights Violations. In *Philosophy and Politics - Critical Explorations* (Vol. 15, pp. 179–197). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57476-5_9
- Cook, S. A. (2023, July 26). *What are Erdogan's Foreign-Policy Goals for Turkey?* <https://foreignpolicy.com/2023/07/26/turkey-erdogan-nato-eu-sweden-future-goals-europe/>
- Copeland, D. C. (1997). Do Reputations Matter?. *Security Studies*, 7(1), 33–71. <https://doi.org/10.1080/09636419708429333>
- Cordesman, A. H. (2019). Turkey and NATO. *Strategic Comments*, 25(9), x–xii. <https://doi.org/10.1080/13567888.2019.1703305>
- Coskun, A. (2023, February 1). *Sweden's NATO Problem is also Turkey's NATO Problem.* <https://carnegieendowment.org/2023/02/01/sweden-s-nato-problem-is-also-turkey-s-nato-problem-pub-88929>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Crowley, M., & Erlanger, S. (2022, May 30). *For NATO, Turkey Is a Disruptive Ally.* <https://www.nytimes.com/2022/05/30/us/politics/turkey-nato-russia.html>
- Danforth, N., & Stein, A. (2023). *Turkey's New Foreign Policy: Ankara's Ambitions, Regional Responses, and Implications for the United States.* *Foreign Policy*

- Research Institute.
https://issuu.com/foreignpolicyresearchinstitute/docs/feb_1_turkey_s_new_foreign_policy
- Detsch, J. (2022, June 27). *Turkey Looks for Pound of Flesh at NATO Summit, Putting Sweden's and Finland's Bids on the Line*. <https://foreignpolicy.com/2022/06/27/turkey-erdogan-nato-summit-sweden-finland-russia/>
- Eichler, J. (2021). NATO After the End of the Cold War. *Vojenské Rozhledy*, 30(2), 003–025. <https://doi.org/10.3849/2336-2995.30.2021.02.003-025>
- Ene, A. M. (2018). The Role of Turkey in the Perspective of NATO's Extension Policies in South-Eastern Europe. *Acta Universitatis Danubius Relationes Internationales (AUDRI)*, 11(1), 172–178. <https://doi.org/https://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/download/5158/4603>
- Erdogan, B. (2022). Investigating Turkey's Changing Narratives Regarding Interventions in Libya and Syria. *European Review of International Studies*, 9(3), 389–430. <https://doi.org/10.1163/21967415-09030003>
- Erdurmaz, P. D. A. S. (2019). Should Turkey Excluded from NATO or She Should Quit it Itself. *Global Journal of Human-Social Science*, 63–78. <https://doi.org/10.34257/gjhssevol19is8pg63>
- Erkoyun, E., & Ozkan, M. (2023, March 31). *Turkish Parliament Ratifies Finland's NATO Accession as Sweden Kept Waiting*. <https://www.reuters.com/world/europe/turkish-parliament-approves-finlands-nato-accession-2023-03-30/>
- Forsberg, T., & Vaahtoranta, T. (2001). Inside the EU, outside NATO: Paradoxes of Finland's and Sweden's post-neutrality. *European Security*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/09662830108407483>
- Forster, A., & Wallace, W. (2001). What is nato for? In *Survival* (Vol. 43, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/00396330112331343155>
- Gardner, F., & Durbin, A. (2023, March 31). *Turkey Approves Finland NATO Membership Bid*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-65132527>
- Grigoriadis, I. N. (2022). Between escalation and détente: Greek-Turkish relations in the aftermath of the Eastern Mediterranean crisis. *Turkish Studies*, 23(5), 802–820. <https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2087509>
- Gunter, M. (2022). Some Implications of Sweden and Finland Joining NATO. *The Commentaries*, 2(1), 91–100. <https://doi.org/10.33182/tc.v2i1.2710>
- Hernandez, G. I. R. (2023, April). *Turkey, Hungary Ratify Finland's NATO Bid*. <https://www.armscontrol.org/act/2023-04/news-briefs/turkey-hungary-ratify-finlands-nato-bid>
- Isachenko, D. (2020). Turkey–Russia Partnership in the War over Nagorno-Karabakh. *SWP Comment*, 53. <https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C53/>
- Jamilah, M., Yonanda, C., Harza, Z., & Masri, I. S. (2020). Factors Supporting Turkey's Policy to Purchase Russian S-400 Anti-Air Strike Defense Units. *Journal of*

- Strategic and Global Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v3i1.1026>
- Kalkan, E. (2020). The Longstanding Dispute between Turkey and Greece: The Aegean Issue. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 28, 167–174. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.713136>
- Kara, M. (2023). Turkish-American strategic partnership: is Turkey still a faithful ally? *Journal of Southeast European and Black Sea*, 23(2). <https://doi.org/10.1080/14683857.2022.2088081>
- Karaosmanoglu, A. L. (1999). NATO Enlargement and the South: A Turkish Perspective. *Security Dialogue*, 30(2), 213–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0967010699030002008>
- Kayali, L. (2023, July 13). *Sorry Russia, the Baltic Sea is NATO's Lake Now*. <https://www.politico.eu/article/nato-lake-what-sweden-and-finland-will-change-in-the-baltics-russia-ukraine-war/>
- Kinacioğlu, M., & Gürzel, A. G. (2013). Turkey's contribution to NATO's role in post-Cold war security governance: The use of force and security identity formation. *Global Governance*, 19(4), 589–610. <https://doi.org/10.1163/19426720-01904007>
- Köse, İ. (2015). Challenges to NATO's Fifth Enlargement Round: Turkey's Attitude towards Romania's Admission. *Codrul Cosminului*, 21(2), 299–312. https://www.researchgate.net/publication/290225895_Challenges_to_NATO's_Fifth_Enlargement_Round_Turkey's_Attitude_towards_Romanian's_Admission
- Marten, K. (2018). Reconsidering NATO expansion: A counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s. In *European Journal of International Security* (Vol. 3, Issue 2, pp. 135–161). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/eis.2017.16>
- Mercer, J. (1996). *Reputation and International Politics*. Cornell University Press.
- Mercer, J. (1997). Reputation and Rational Deterrence Theory. *Security Studies*, 7(1), 100–113. <https://doi.org/10.1080/09636419708429335>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mitchell, A. W. (2023, February 24). *NATO: Keep Urging Turkey to Admit Sweden, Finland as Allies*. <https://www.usip.org/publications/2023/02/nato-keep-urging-turkey-admit-sweden-finland-allies>
- Mousseau, D. Y., Napolitano, J., & Olsen, A. (2019). Introducing the Human Rights Violations Dataset for the Kurdish Conflict in Turkey, 1990-2018. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 25(4). <https://doi.org/10.1515/peps-2019-0036>
- Neset, S. (2023). What Turkey Wants: Turkey's Objection to Finland and Sweden's NATO Membership Applications. *IFS Insights*, 3, 2–3. https://www.forsvaret.no/forskning/fou-formidling-ved-forsvarets-hogskole/IFS_Insight_3_2023_Turkey.pdf/_attachment/inline/25a3440c-8e39-4114-90eb-6690f0e161fc:477749fe9fe83270ffd7d962c4a26e383ab5fa41/IFS_Insight_3_2023_Turkey.pdf

- Nikolin, B. (1998). NATO's Eastward Expansion. *Russian Politics & Law*, 36(4), 39–49. <https://doi.org/10.2753/rup1061-1940360439>
- Nokkala, A. (2023). It Is About Protection. Defence in Finland's Steps to NATO. *Studia Europejskie - Studies in European Affairs*, 26(4), 39–72. <https://doi.org/10.33067/se.4.2022.2>
- Oğuzlu, T. (2012a). Turkey's eroding commitment to NATO: From identity to interests. *Washington Quarterly*, 35(3), 153–164. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2012.706578>
- Oğuzlu, T. (2012b). Turkey and NATO: An ambivalent Ally in a changing Alliance. *Uluslararası İlişkiler*, 9(34), 99–124. https://www.researchgate.net/publication/332909849_Turkey_and_NATO_An_ambivalent_Ally_in_a_changing_Alliance
- Oztig, L. I. (2020). The Turkish–Greek Border Crisis and COVID-19. *Borders in Globalization Review*, 2(1), 78–81. <https://doi.org/10.18357/bigr21202019843>
- Robinson, K. (2023, July 11). *Turkey's Growing Foreign Policy Ambitions*. <https://www.cfr.org/backgrounder/turkeys-growing-foreign-policy-ambitions>
- Rogozińska, A. (2020). The role of NATO in shaping the global security system. Reflections on the 70th anniversary of the founding of the organization. *Belügyi Szemle*, 68(1. ksz.). <https://doi.org/10.38146/bsz.spec.2020.1.3>
- Seufert, G. (2020). Turkey Shifts the Focus of Its Foreign Policy: From Syria to the Eastern Mediterranean and Libya. *SWP Comment*, 6, 1–4. <https://doi.org/10.18449/2020C06>
- Soekarba, S. R., Ayona, D., & Shavira, C. J. (2019). Stabilizing or Destabilizing? Reconsidering the Relevance of Turkey's NATO Membership. *International Review of Humanities Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/irhs.v4i1.137>
- Starr, H., & Siverson, R. M. (1990). Alliances and geopolitics. *Political Geography Quarterly*, 9(3), 232–248. [https://doi.org/10.1016/0260-9827\(90\)90025-6](https://doi.org/10.1016/0260-9827(90)90025-6)
- Suleymanov, A. V. (2019). Cyprus problem: History and present. *World Economy and International Relations*, 63(2), 75–84. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-2-75-84>
- Temko, N. (2023, February 2). *Turkey in NATO: Inscrutable, Unreliable, but Indispensable*. <https://www.csmonitor.com/World/2023/0202/Turkey-in-NATO-Inscrutable-unreliable-but-indispensable>
- Tuncer, A. M. (2022). Turkey's Options for Finland and Sweden's NATO Membership Applications. *International Journal of Science and Research*, 11(5), 1579–1582. https://www.researchgate.net/publication/360815928_Turkey's_Options_for_Finland_and_Sweden's_NATO_Membership_Applications
- Yackley, A. J., & Milne, R. (2023, March 17). *Turkey drops opposition to Finland's bid to join Nato | Financial Times*. <https://www.ft.com/content/0e6be021-6471-4b30-ba72-33fc9fa6ccd5>
- Yilmaz, Ş. (2012). Turkey's quest for NATO membership: The institutionalization of the Turkish-American alliance. *Journal of Southeast European and Black Sea*, 12(4).

<https://doi.org/10.1080/14683857.2012.741844>